

Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Lusya Fista¹ Parjiyana²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Pemberhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
lusyafista@student.uir.ac.id parjiyana@soc.uir.ac.id

Received : February 13, 2024;

Accepted : 23 Juli 2024

Abstract

This research uses qualitative and quantitative methods. The type of approach in this research uses a descriptive approach, namely describing and analyzing the problems found. The types and sources of data used are primary data and secondary data. In this research, data was collected through observation, interviews, questionnaires and documentation. Then descriptive analysis is used as a data analysis technique. The aim of this research is to analyze and determine the implementation of the Village Head's function in community development and to determine the obstacles to the implementation of the Village Head's function in community development in Kuantan Babu Village. The assessment indicators in the social development variable used by the author include planning, guidance and supervision. This research was conducted in Kuantan Babu Village, Rengat District, Indragiri Hulu Regency and the research population was the Kuantan Babu Village Government with a sample of 37 people. The author uses a purposive sampling technique, namely only certain respondents who are considered representative and have a better understanding of the problem being studied. Overall, this research shows that the Implementation of the Village Head's Functions in Community Development in Kuantan Babu Village, Rengat District, Indragiri Hulu Regency is at a Sufficiently Implemented interval.

Key Words : *Implementation, Function, Community Building*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang ditemukan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian digunakan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dari pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu. Indikator penilaian dalam variabel pembinaan kemasyarakatan yang digunakan penulis meliputi perencanaan, bimbingan, dan pengawasan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan populasi penelitian adalah Pemerintah Desa Kuantan Babu dengan sampel 37 orang. Penulis menggunakan teknik penarikan sampel purposive yaitu hanya responden tertentu yang dianggap mewakili dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu berada pada interval Cukup Terlaksana.

Key Words : *Pelaksanaan, Fungsi, Pembinaan Kemasyarakatan*

Pendahuluan

Semenjak dimulainya desentralisasi di Indonesia, setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka desa juga dapat dikatakan memiliki hak dan kewenangan yang sama untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masing-masing. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, bahwa Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang luas wilayahnya 8.198,71 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 466.436 jiwa dan kepadatan penduduk 57 jiwa/km². Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Rengat, tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi kedalam 14 kecamatan, 154 desa, dan 11 kelurahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di salah satu desa yang berada di Kecamatan Rengat yaitu Desa Kuantan Babu.

Desa Kuantan Babu adalah salah satu dari 16 desa di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Kuantan Babu pertama kali didirikan pada tahun 1950 dengan luas kurang lebih 27 km². Desa Kuantan Babu dibagi menjadi enam daerah yang masing-masing diberi nama dusun, yaitu Dusun I Benosari, Dusun II Indahsari, Dusun III Mekarsari, Dusun IV Wonosari, Dusun V Tanjungsari, Dusun VI Rawasari.

Pemerintahan sebuah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 26 Ayat (3) Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa memiliki fungsi diantaranya menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Selanjutnya hal serupa juga disebutkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 82 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (2) Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang, Kepala Desa memiliki fungsi dalam pembinaan kemasyarakatan. Maka dalam hal pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan terhadap individu maupun kelembagaan. Pembinaan Kepala Desa ini pada dasarnya adalah ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa itu sendiri. Segala bentuk pembinaan tersebut harus dipahami pemerintah dan masyarakat yang dimana harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Secara umum pembinaan adalah sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia mempunyai tujuan hidup tertentu dan memiliki kemauan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya apabila tujuan hidup mereka tidak tercapai. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat ke arah kemajuan dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan ditujukan untuk mengubah masyarakat yang sebelumnya kurang peduli terhadap lingkungan desa menjadi lebih peduli dan aktif dalam kegiatan yang dilakukan di desa.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa juga merupakan lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikannya pembangunan yang ada di desa. Jadi, dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan desa adalah salah satu wadah pembinaan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan pendapat The Liang Gie (1983 : 193) (dalam Rauf dan Munaf, Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia, 2015) Pembinaan adalah suatu usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan, dan pengendalian/pengawasan. Namun proses kegiatan perencanaan, bimbingan, dan pengawasan oleh Kepala Desa belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil observasi penulis dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 26 Ayat (3) Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa memiliki fungsi dalam pembinaan kemasyarakatan, namun kenyataan dilapangan masih belum optimalnya pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu. Hal ini dapat dilihat dari bidang partisipasi masyarakat yaitu kurangnya peran serta karang taruna dalam mengatasi permasalahan pemuda sehingga kegiatan karang taruna menjadi kurang efektif. Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya pengawasan dan koordinasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti RT/RW dalam kegiatan kamtibmas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui hambatan-hambatan dari pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Administrasi Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Administrasi" mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian menurut Silalahi (2010 : 8) (dalam Marliani, 2018) Administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Pada dasarnya tata usaha adalah pekerjaan yang berkaitan dengan menulis, mencatat, menggandakan, menyimpan, atau pekerjaan sipil. Sedangkan Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Kegiatan kerjasama

yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan disebut administrasi. Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, secara teratur, dan terarah berdasarkan kesepakatan untuk membagi tugas masing-masing.

Menurut The Liang Gie (1993) (dalam Drs. Darmanto, 2019) administrasi adalah setiap jenis kegiatan penataan pekerjaan dasar yang dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih) secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, administrasi harus memiliki ciri-ciri: dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih) secara kooperatif, administrasi merupakan suatu proses kerja sama, dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan

Menurut konsep (Andry dan Yussa, *Perilaku & Etika Administrasi Publik*, 2020) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih secara rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, menurut Nawawi (1999 : 1) (dalam I.Arends, 1999) administrasi adalah proses kegiatan mengawasi sebagai upaya kolektif atau pengendalian sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep Organisasi

Menurut Chester I. Bernard (dalam Hajar Malawat, 2022) Organisasi adalah sebuah sistem kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang memerlukan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama.

Kemudian menurut (Erma Widiana, 2020) Organisasi adalah kesatuan (entity) social yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Robbins (1994: 4) (dalam Sahadi et al., 2022) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Kemudian menurut (Hubaisy et al., 2014) Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi organisasi publik adalah untuk melayani masyarakat.

Menurut (Muchlis Adnan & Hamim, 2013) Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan, artinya bahwa adanya organisasi memudahkan kerjasama yang tertata dan terstruktur, sehingga karyawan merasa nyaman melaksanakan tugasnya sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan (dalam Mustanir et al., 2020) menurutnya pengertian organisasi adalah sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep Manajemen

Menurut Henry Fayol (dalam Kuddus, 2019) Manajemen suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Afandi (2018) (dalam Handrian 2023) Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan, yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya

Menurut G.R. Terry (dalam Hajar Malawat, 2022) mengatakan bahwa tugas manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian. Sebaliknya, John F. Mee mengatakan bahwa tugas manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian. Berbeda dengan pendapat Henry Fayol, ada lima fungsi manajemen: rencana, organisasi, perintah, koordinasi, dan pengendalian. Ada banyak pendapat lain dari pakar manajemen tentang fungsi manajemen. Untuk menjamin implementasi proses manajemen yang efektif, setiap manajer harus melakukan fungsi-fungsi manajemen tersebut secara berurutan.

Menurut (Muchlis Adnan & Hamim, 2013), Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting untuk menggerakkan organisasi, karena sebagian besar tujuan ekonomi, sosial, dan politik organisasi tergantung pada manajernya.

Konsep Pelaksanaan

Westra (2011 : 24) (dalam Moderat, 2018) mengemukakan bahwa Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Tjokroadmudjoyon (2014 : 12) (dalam Zaili Rusli, 2021) Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Kemudian menurut Terry (dalam Syafiie, 2006 : 126) Pelaksanaan tugas berfokus pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada, pelaksanaan tugas membutuhkan pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Menurut Nawawi (2009 : 95) (dalam Zaili Rusli, 2021) Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Pelaksanaan menurut Westra (2011) (dalam Tiballa, 2017) adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala alat yang dibutuhkan, orang yang melaksanakan, tempat pelaksanaan dan waktu dimulainya.

Konsep Fungsi

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, fungsi adalah kegunaan, daya guna, dan pekerjaan yang dilakukan suatu hal. Menurut The Liang Gie (dalam Janice, 2015) fungsi adalah kumpulan aktivitas yang sama berdasarkan sifat, pelaksanaan, dan faktor lain. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain yang dilakukan oleh seorang pegawai tertentu, masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Jadi, fungsi adalah tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain.

Kemudian menurut The Liang Gie (dalam Nining, 2008) Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang sama jenisnya berdasarkan karakteristik, pelaksanaan, atau pertimbangan lainnya. Untuk melakukan usaha kerjasama, aktivitas-aktivitas ini biasanya digabungkan menjadi satu kesatuan dan diserahkan kepada seorang pejabat atau satuan organisasi.

Menurut Sutarto (1993 : 126), fungsi didefinisikan sebagai aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat terkait yang dilakukan oleh seorang pejabat tertentu.

Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa sesuatu telah mengalami kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atau berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan. Ada dua komponen dalam definisi ini yaitu pembinaan itu sendiri dapat berupa tindakan, proses, atau pernyataan suatu tujuan, dan pembinaan kedua dapat menunjukkan bahwa sesuatu dapat diperbaiki. (Karmelia & Riauan, 2022).

Sedangkan menurut A.W. Widjaja (2000 : 14) (dalam Kadarisman, 2021) Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Menurut The Liang Gie (1983 : 193) (dalam Rauf dan Munaf, Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia, 2015) Pembinaan adalah suatu usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan, dan pengendalian/pengawasan. Dengan demikian pembinaan yang baik merupakan usaha pengkoordinasian atau penyatuan dari kegiatan perencanaan, bimbingan, dan pengawasan

- a. Perencanaan menurut Tjokomidjojo (1986 : 13) adalah suatu proses mengatur apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Bimbingan menurut Ndraha (1986:19) merupakan suatu proses tindakan untuk mengubah cara seseorang berpikir dari yang salah ke yang benar dengan membantu mereka memahami dan mengendalikan diri sehingga mereka dapat menghayati dan menerapkannya dengan cara yang mereka inginkan.
- c. Pengawasan menurut Atmosudirdjo (1982 : 26) secara dasar terdiri dari pengukuran operasi menggunakan standar untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dikombinasikan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Selanjutnya pendekatan kuantitatif adalah data kuantitatif dalam bentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (scoring). Populasi penelitian ini berjumlah 47 orang dan sampel penelitian ini berjumlah 37 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Ketua BPD, Ketua BUMDES, Ketua LPMD, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT.

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis membagi dan mengolah data menurut jenisnya. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, dan persentase dan disertai dengan uraian dan keterangan yang mendukung. Selanjutnya data ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran data yang lebih terperinci. Kemudian mendapatkan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk penelitian secara ilmiah.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil penelitian Kepala Desa sudah cukup melaksanakan perencanaan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi, indikator perencanaan oleh Kepala desa dapat dikatakan cukup terlaksana. Hal tersebut dilihat dari hasil observasi penulis bahwa Kepala Desa pernah melakukan perencanaan terkait pembinaan kemasyarakatan di Desa melalui kegiatan musyawarah desa. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang sudah diolah penulis, diketahui bahwa total skor jawaban mengenai indikator perencanaan adalah sebesar 267 dimana berada pada interval 234 – 326 (cukup terlaksana).

Kepala Desa juga sudah memberikan bimbingan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu. Jadi, indikator bimbingan oleh Kepala desa dapat dikatakan cukup terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi penulis bahwa Kepala Desa pernah melakukan bimbingan terkait pembinaan kemasyarakatan di Desa pada saat adanya pertemuan, sosialisasi, dan penyuluhan. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang sudah diolah penulis, diketahui bahwa total skor jawaban mengenai indikator bimbingan adalah sebesar 303 dimana berada pada interval 234 – 326 (cukup terlaksana).

Selanjutnya mengenai pengawasan oleh Kepala Desa sudah dilaksanakan di Desa Kuantan Babu. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih belum berjalan secara optimal sehingga masih terdapat kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang tidak terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi penulis bahwa Kepala Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kemasyarakatan lebih sering

dilakukan secara tidak langsung dan tidak ada dokumen laporan secara tertulis mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa. Jika pengawasan tersebut dilakukan secara langsung Kepala Desa dapat melihat secara langsung bagaimana proses berjalannya kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sehingga akan diketahui apa yang harus di evaluasi dari pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang sudah diolah penulis, diketahui bahwa total skor jawaban mengenai indikator bimbingan adalah sebesar 198 dimana berada pada interval 141 – 233 (kurang terlaksana).

Tabel 1.

Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1.	Perencanaan	267	Cukup Terlaksana
2.	Bimbingan	303	Cukup Terlaksana
3.	Pengawasan	198	Kurang Terlaksana
Total Skor		768	Cukup Terlaksanana

Data Olahan Penulis 2024

Dari tabel rekapitulasi diatas terlihat bahwa pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dimana skor terbesar diperoleh dari indikator bimbingan. Sedangkan skor terkecil terdapat pada indikator pengawasan. Jadi, secara keseluruhan atau dari tiga indikator pembinaan diatas, diperoleh jumlah total skor sebesar 768 atau berada dalam interval pengukuran 700 – 979 (cukup terlaksana). Dengan demikian, berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, hasil kuesioner, dan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang mencakup merencanakan kegiatan, memberikan bimbingan, dan melakukan pengawasan dikategorikan cukup terlaksana.

Mengenai indikator perencanaan yaitu pada rapat atau pertemuan tidak sering dilakukan oleh Kepala Desa, tetapi menurut responden dan hasil observasi penulis bahwa perencanaan yang membahas kegiatan pembinaan kemasyarakatan di desa pernah dilaksanakan. Selanjutnya untuk indikator bimbingan Kepala Desa, hasilnya menunjukkan bahwa Kepala Desa telah melakukan bimbingan terkait pembinaan kemasyarakatan selama pertemuan, sosialisasi, dan penyuluhan. Kemudian untuk indikator pengawasan Kepala Desa, hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan kepala desa kurang terlaksana, seperti yang ditunjukkan oleh jawaban dan tanggapan responden yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan kepala desa kurang efektif karena dilakukan secara tidak langsung, dan tidak adanya dokumen laporan secara tertulis untuk Kepala Desa mengenai kegiatan pembinaan kemasyarakatan di desa.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa kepala desa seharusnya memberikan instruksi yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan baik.

Hambatan Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, hal-hal berikut adalah kendala yang diketahui dan terjadi pada saat Kepala Desa melaksanakan fungsinya dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu diantaranya yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan atau aktivitas terkait pembinaan kemasyarakatan di Desa. Hal ini dikarenakan letak desa kuantan babu berada di daerah pinggiran kota sehingga mempengaruhi pola perilaku masyarakat tersebut yang individualism, kurangnya peran Karang Taruna untuk mendorong partisipasi masyarakat khususnya pemuda untuk menyukseskan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di desa, masih kurang koordinasi antara Kepala Desa dengan ketua RT/RW, sehingga beberapa kegiatan yang ada diadakan di desa menjadi terkendala karena kurangnya informasi yang diberikan oleh RT/RW kepada masyarakat, dan pengawasan yang dilakukan Kepala Desa belum secara menyeluruh, sehingga masyarakat menjadi lengah terhadap kegiatan pembinaan kemasyarakatan di desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu adalah Cukup Terlaksana. Adapun rincian mengenai pelaksanaan fungsi Kepala Desa Kuantan Babu dalam pembinaan kemasyarakatan yakni Kepala Desa cukup melaksanakan perencanaan sebagai bentuk dari pelaksanaan fungsi pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu. Diketahui dari adanya melaksanakan musyawarah desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mana didalamnya juga terdapat perencanaan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan. Selanjutnya Kepala Desa cukup melaksanakan bimbingan sebagai bentuk dari pelaksanaan fungsi pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Kepala Desa pernah melakukan bimbingan terkait pembinaan kemasyarakatan di Desa pada saat adanya pertemuan, sosialisasi, dan penyuluhan. Selanjutnya Kepala Desa kurang melaksanakan pengawasan sebagai bentuk dari pelaksanaan fungsi pembinaan kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu. Berdasarkan hasil obeservasi dan hasil penelitian oleh penulis bahwa Kepala Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kemasyarakatan lebih sering dilakukan secara tidak langsung dan tidak ada dokumen laporan secara tertulis mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa.

Daftar Pustaka

- Andry dan Yussa. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Drs. Darmanto, M. E. (2019). Pengertian Administrasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–9. [http://repository.unpas.ac.id/9946/4/BAB II acul.pdf](http://repository.unpas.ac.id/9946/4/BAB%20II%20acul.pdf)
- Erma Widiana, M. (2020). *Pengantar Manajemen*.

- Hajar Malawat, S. (2022). Buku Pengantar Administrasi Publik. In Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, Eko dan Syafikri Ahmad. 2023. "Jurnal Administrasi Negara." *Jurnal Administrasi Negara Tahun 2023* 20(1)(April): 22–31.
- Hubaisy, Z., Suharsono, A., & Helpiastuti, S. B. (2014). Evaluasi Kinerja PDAM Kota Probolinggo dalam Perspektif Balanced Scorecard. *E-SOSPOL*, 1(1), 10–24.
- I.Arends, R. (1999). PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI DAN FUNGSINYA UNTUK Mendukung Perkembangan Ilmu Administrasi. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1460–1471. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_\(10-13-15-11-03-27\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_(10-13-15-11-03-27).pdf)
- Kadarisman, M. (2021). Peningkatan Kinerja Sekolah Melalui Manajemen Pengembangan Guru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), 295–307. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5150366>
- Karmelia, S., & Riauan, M. A. I. (2022). Komunikasi Interpersonal Dalam Pembinaan Keterampilan Warga Binaan Kelas 2A Dewasa Kota Pekanbaru. *The Journal of ...*, 1(1), 42–53. <https://journal.rc-communication.com/index.php/JMCO/article/view/42>
- Kuddus, M. (2019). Manajemen Dan Eksekutif. 3(2), 51–66.
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Moderat, J. (2018). Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. 4(November), 69–80.
- Mustanir, A., S, F., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 84–108. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.8>
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Sahadi, Neti Sunarti, & Endah Puspitasari. (2022). PENGEMBANGAN ORGANISASI (Tinjauan Umum Pada Semua Organisasi). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 399–412. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2712>
- Siagian, P. (2019). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sutarto. (1993). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM.
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung: Sinar Grafika Offset.

- Tiballa, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten. 5(1), 445–456.
- Zaili Rusli. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Perluasan Kesempatan Kerja Di Kota Pekanbaru. <https://Medium.Com/>, 8, 1–16.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Zainal, Nining H. Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar.
<https://scholar.google.co.id/citations?user=HePFA9kAAAAJ&hl=id>

Dokumen:

- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 82 Tahun 2016 Tentang: *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang: *Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang: *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang: *Desa*.